

Optimalisasi Manajemen Logistik Berbasis Teknologi Informasi Guna Mendukung Operasional Pengamanan Mudik Lebaran Paripurna COVID-19

Soecipto

email: soecipto@gmail.com

Abstract

CV Gradient Abstract: ABSTRACT IN ENGLISH VERSION: In contrast to the previous two years, the government allowed people to go home for Eid in 2022. The government has optimism that the 2022 Eid homecoming implementation can run safely from the COVID-19 attack. In fulfilling the logistics of the Police, especially in meeting the needs for infrastructure, there are several logistical errors, namely: 1) Errors in planning facilities and infrastructure; 2) Incorrect procurement, both in terms of quantity and type of equipment; 3) Wrong in equipment distribution; 4) Weaknesses in the misuse of infrastructure facilities; 5) Delivery, storage and use that are not in accordance with the proper standards, resulting in equipment defects; 6) Specific errors in storage within a certain time; 7) Errors in equipment maintenance; 8) Lack of supervision and control resulting in equipment being lost, damaged or not functioning properly. The research method is a qualitative research with a literature study method, research The research method is a qualitative research with literature study methods, descriptive research and field observations. The reason this method is used is because there is still a pandemic threat and very high activity from the police so that data cannot be searched in the field. In large numbers, the sample population/subjects are UNINUS postgraduate postgraduate students who are also members of the National Police. The place and time are the Nusantara Islamic University Campus, West Java Regional Police and several homecoming post points. The result is the conclusion that there is a need for strict monitoring and monitoring of the homecoming flow and recommendations to the police leadership.

Keyword: Logistics Management, Information, mudik, Covid

Pendahuluan

Dalam mendukung pembangunan nasional tersebut pemerintah dan DPR telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Sasaran yang

hendak dicapai pada periode ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai

bidang dengan penekanan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Empat pilar utama pembangunan pada RPJMN 2020-2024 adalah: 1) kelembagaan politik hukum yang mantap; 2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) struktur ekonomi yang semakin maju; 4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Namun demikian dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, bangsa Indonesia dikejutkan dengan hambatan dan gangguan berupa meluasnya virus mematikan, yakni Virus Corona yang menyebabkan pandemi Covid-19. Berkembangnya virus tersebut bukan saja mengganggu kondisi kesehatan hingga membawa kematian, melainkan juga telah menciptakan kemerosotan ekonomi. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pemerintah mengizinkan masyarakat melakukan mudik Lebaran pada tahun 2022 ini. Pemerintah memiliki optimisme penyelenggaraan mudik Lebaran 2022 dapat berjalan aman dari serangan COVID-19. Pemerintah memastikan, kebijakan mudik tahun ini juga dipersiapkan dengan matang bekerja sama berbagai lintas sektor. Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar masyarakat tetap waspada. Virus Corona SARS-CoV-19 penyebab COVID-19 masih ada. Beliau menghimbau agar gelombang baru penularan COVID-19 jangan sampai terjadi dengan adanya perjalanan mudik Lebaran tahun 2022.

Kenyataannya pengalaman tahun 2021 ketaatan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama mudik sangat rendah. Pemerintah melalui Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan rendahnya ketaatan menjalankan protokol kesehatan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 yang juga diakibatkan mobilitas penduduk saat Lebaran 2021.

Dalam empat hari terakhir terdapat

penambahan kasus Covid-19 sebanyak lima ribu kasus. Kasus Covid-19 diprediksi akan terus meningkat karena mobilitas masyarakat dan varian baru Coronta tersebut. Pasca mudik data per 23 Mei 2021, terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. Sepuluh provinsi tersebut di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah akan menambah provinsi yang akan menerapkan PPKM mikro pada periode selanjut Polri sesuai dengan Undang-undang no 2 tahun 2022 memiliki tugas pokok a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri selama ini telah berada di garda terdepan dalam proaktif menjaga keselamatan masyarakat khususnya pada kondisikontijensipandemi Covid-19. Dalam menjalankan tugasnya untuk berperan aktif dalam pendudukan pengamanan mudik lebaran 2022 dibutuhkan dukungan sarana prasarana. Secara ideal pemenuhan sarana prasarana seoptimal mungkin, memenuhi kebutuhan dan memperlancar tugas-tugas personel Polri di lapangan. Pemenuhan sarana prasarana harus memenuhi aturan dan siklus logistik.

Namun faktanya pemenuhan sarana prasarana bagi tugas-tugas Polri terkendala beberapa hal berikut yaitu keterbatasan sumber daya dan tuntutan kemampuan, menyediakan dukungan barang/jasa untuk penyelenggaraan tugas lapangan. Kurangnya pembinaan dan penggunaan seluruh komponen kekuatan organisasi. Hal ini sering menghambat tugas-tupersonel Polri di lapangan. Dalam pemenuhan logistik Polri khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana terdapat beberapa kesalahan logistik yaitu: 1) Kesalahan dalam perencanaan sarana dan prasarana serta kesalahan dalam penentuan

kebutuhan lapangan; 2) Salah dalam pengadaan baik dari sisi jumlah maupun jenis peralatan; 3) Salah dalam distribusi peralatan seperti tertukar, jumlahnya yang berlebih di satu tempat dll; 4) Kekurangan dalam kesalahan pemakaian sarana prasarana yang menimbulkan menurunnya kinerja peralatan; 5) Pengiriman, penyimpanan dan penggunaan yang tidak sesuai standar yang seharusnya sehingga menimbulkan kecacatan peralatan; 6) Kesalahan khusus dalam penyimpanan dalam waktu tertentu; 7) Kesalahan dalam perawatan peralatan; 8) Kurangnya pengawasan dan kontrol yang mengakibatkan peralatan hilang, rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Padahal dalam kegiatan mudik lebaran kesiapsiagaan personil Polri membutuhkan kewaspadaan tinggi baik dalam pengawasan ketaatan berlalu lintas, ketaatan aturan PPKM, kerawanan KAMTIBMAS, penguraian kemacetan, potensi wilayah keramaian yang rawan Kamtibmas dan paparan pandemi, sosialisasi dan pembinaan serta penegakkan hukum atas berbagai pelanggaran. Jika hal ini tidak didukung sarana prasarana yang prima sepanjang waktu, tugas akan minim keberhasilan dan bahkan membahayakan keselamatan personil Polri sendiri dan masyarakat. Keberhasilan dalam paripurna Covid-19 dengan terjaganya kesehatan masyarakat dan peningkatan perekonomian akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian deakriptif dan observasi di lapangan alasan metode ini digunakan karena masih adanya ancaman

pandemi serta kesibukan yang sangat tinggi dari aparat kepolisian sehingga tidak dapat dicari data dalam jumlah besar, populasi.

Sampel /subjek adalah mahasiswa pasca sarjana S2 UNINUS yang juga merupakan anggota Polri. Tempat dan waktu adalah Kampus Universitas Islam Nusantara, POLDA Jawa Barat dan beberapa titik posko mudik, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan analisis dan manajemen strategik. Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hasil dan pembahasan

1. Manajemen Sarana Prasarana Polri

Agar pelaksanaan pengelolaan (siklus) logistik dapat efektif dan efisien dalam suatu manajemen organisasi, maka diperlukan manajemen logistik/ manajemen sarana prasarana.

Manajemen logistik/ manajemen sarana prasarana merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi Polri. Sedangkan Siklus Sarana prasarana terdiri dari: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pengawasan dan pengendalian. Perencanaan sarana prasarana untuk manajemen operasional mudik lebaran secara singkat harus dimulai dengan 1) Koordinasi pimpinan dan peraturan pelaksanaan pengamanan operasional mudik; 2) Pemetaan wilayah dan organisasi; 3) Inventarisasi organisasi dan kebutuhan; 4) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 5) pengadaan dan distribusi sarana

prasarana; 6) serah terima dan pencatatan sarana prasarana di lapangan secara berjenjang; 7) pemantauan penggunaan; 8) pemantauan penyimpanan; 9) pemantauan pemeliharaan; 10) pengendalian dan pelaporan. Pemenuhan sarana prasarana harus memenuhi pelaksanaan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif.

2. Pendukung Sarana Prasarana terhadap manajemen fungsi operasional Polri.

Penulis mendalami hal ini dengan melaksanakan studi literatur, observasi, koordinasi dan diskusi mendalam. Dimana didapatkan bahwa terdapat setidaknya fungsi pendukung 3 kelompok operasional Polri yaitu Pendukung sarana prasarana terhadap fungsi pencegahan yang meliputi lima hal, yaitu 1). identifikasi titik potensi kerumunan; 2) Pengawasan pelaksanaan vaksinasi bagi pemudik, pemudik yang telah divaksin ketiga/booster dapat beraktivitas bebas tanpa pengecekan surat negatif Covid. Pemudik dengan vaksin 1-2 harus menunjukkan surat antigen 3). sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer) terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau musala), atau tempat perkumpulan kegiatan sosial-budaya lainnya; serta 4). sosialisasi kehati-hatian mobilitas masyarakat lintas kota/kabupaten/ provinsi/ negara untuk keperluan mudik. Sosialisasi persiapan masyarakat terdaftar sebagai masyarakat yang telah divaksin di Peduli Lindungi Diri 5). Pengawasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya; serta 6). Pengawasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/

provinsi/negara ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19. 6) Pengawasan masyarakat. Pendukung sarana prasarana terhadap fungsi penanganan, yang meliputi enam hal, yaitu 1). memastikan penanganan kesehatan 3T (*testing, tracing, treatment*) bagi warga yang positif terinfeksi Covid-19 atau Omicron dan warga yang kontak erat; serta 2). Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri secara sadar kecuali untuk tujuan bekerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh dua orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. 5). membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau zakat kepada warganya dalam rangka penanganan dampak ekonomis; serta 6). melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19. Potensi masalah kemacetan dan kerumunan. Pendukung sarana prasarana terhadap fungsi pembinaan yang mencakup dua hal yaitu penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro serta pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro.

Pendukung sarana prasarana terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan logistik, dukungan komunikasi dan administrasi posko COVID-19 desa/kelurahan.

3. Analisa terhadap permasalahan Manajemen Operasional Sarpras.

prasarana Polri yaitu keterbatasan sumber daya dan tuntutan kemampuan, menyediakan dukungan barang/jasa untuk penyelenggaraan tugas lapangan. Kurangnya pembinaan dan penggunaan seluruh komponen kekuatan organisasi.

Untuk hal tersebut perlunya perencanaan yang baik dalam manajemen sarana prasarana. Pengumpulan database sarpras yang tepat dan rutin, pengadaan dengan teknologi informasi yang transparan melalui LPSE, penyimpanan yang baik, perawatan dan perbaikan yang baik akan menempatkan sumber daya yang terbatas dengan tepat. tuntutan kemampuan, menyediakan dukungan barang/jasa untuk penyelenggaraan tugas lapangan dapat dipenuhi dengan alokasi anggaran yang tepat, pengadaan yang transparan dan pelaksanaan siklus sarana prasarana yang dilaksanakan secara optimal.

a). Perencanaan sarana prasarana yang dapat didahului dengan pemetaan wilayah di Jawa - Bali sebagai pusat mudik nasional dan kemudian dilaksanakan dengan manajemen demand (manajemen permintaan) yang meliputi kegiatan peramalan (*forecasting*) dengan melihat catatan rekam jejak dan dengan permintaan yang sifatnya insidental. Kedua bentuk perencanaan tersebut dapat dikombinasikan dengan manajemen yang tepat. Manajemen perencanaan sarpras akan meminimalisir salah perencanaan.

Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana prasarana yang kurang/ tidak memandang kebutuhan ke depan, kurang memperhatikan lingkungan, dan kurang cermat dalam menganalisisnya. Kesalahan rencana ini bisa berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, metode/ cara pengadaan, jumlah, waktu pengadaan, tempat/ asal pengadaan maupun kesalahan dalam rencana harga.

b) Manajemen operasional dalam pengadaan sarana prasarana dengan

perencanaan jenis, spesifikasi, metode, jumlah, waktu dan sumber pemasok yang tepat. Saat ini teknologi informasi melalui sistem SPSE dalam pengadaan dengan e-catalog sangat mempermudah proses pengadaan dan meminimalisir kesalahan dalam pengadaan.

Pendidikan dan pelatihan yang tepat kepada Slog Polri sampai kepada Biro Logistik Polda sampai logistik tingkat Polres dan Polsek akan memperbaiki sistem pengadaan sarpras. Konsentrasi dan kehati-hatian dalam salah pengadaan merupakan kehati-hatian dalam kekeliruan dalam proses pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, cara/metode pengadaan, jumlah, harga, waktu, sumber sarana prasarana, maupun ketidaksesuaian dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

c). Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengiriman, penerimaan dan penyimpanan sementara menjadikan peralatan salah penempatan. Penerimaan sampai ke titik-titik fokus mudik lebaran dengan tepat akan memperlancar operasional pengamanan mudik lebaran. Pendidikan dan pelatihan yang tepat kepada Slog Polri sampai kepada Biro Logistik Polda sampai logistik tingkat Polres dan Polsek akan memperbaiki sistem rantai pasok sarpras. Manajemen operasional sarana prasarana yang tepat akan meminimalisir salah tempat yang merupakan kekeliruan dalam peletakan sarana prasarana, sehingga bisa mengganggu kelancaran aktivitas suatu unit kerja dan atau organisasi secara keseluruhan.

d). Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penggunaan sarana prasarana yang tepat menjadikan peralatan optimal fungsinya meningkatkan kehandalan dan keawetan peralatan. Pendidikan dan pelatihan yang tepat kepada seluruh personil Polri pelaksana lapangan pengamanan mudik lebaran dalam penggunaan berbagai peralatan

akan meminimalisir salah pakai. Slog Polri menyediakan buku panduan penggunaan peralatan akan juga meminimalisir salah pakai. Salah pakai merupakan kekeliruan dalam penggunaan barang karena tanpa disertai rasa tanggung jawab, baik secara teknis fungsional maupun hak pemakai barang. Perlunya sosialisasi berkelanjutan, pemberian reward dan punishment terhadap personil Polri yang berhubungan dengan kinerja operasional dan kinerja manajemen sarpras akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. e. Kompetensi personil, Kehati-hatian dan tanggung jawab untuk meminimalisir apa yang disebut sebagai Lalai cacat yang merupakan kealpaan dalam pencatatan sarana prasarana baik menyangkut kegiatan dan waktu pencatatan itu sendiri, maupun menyangkut kebenaran data, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi logistik, jumlah, harga, sumber, tempat penempatan/pemakaian, kondisi, maupun data pencatatan yang lainnya.

f) Kompetensi dalam perawatan akan meminimalisir lalai rawat. Lalai rawat merupakan ketidakteraturan dan kesalahan dalam perawatan sarana prasarana, sehingga secara teknis dapat menimbulkan kerusakan sarana prasarana yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kuantitas maupun kualitas output, tidak tercapainya secara optimal batas umur pemakaian barang, dan secara ekonomis dapat menimbulkan pemborosan bagi organisasi Polri.

g) Kompetensi dan sarana prasarana tempat dalam penyimpanan peralatan. Lalai simpan merupakan kealpaan dalam penyimpanan sarana prasarana yang berupa tidak ditempatkannya pada tempat yang semestinya, sehingga memungkinkan menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas sarana prasarana, baik terhadap barang itu sendiri maupun barang yang lain, bahkan juga dapat menimbulkan hilangnya sarana prasasti.

h) Lemahnya pengawasan vertikal dan eksternal serta lemahnya dokumentasi jumlah, dan kondisi mejadikan sarpras tidak optimal. Lalai kontrol merupakan kealpaan dalam pengawasan, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diawasi atau objek pengawasan, waktu pengawasan, maupun metode pengawasan. Dengan dapat diidentifikasi berbagai kesalahan dalam pengelolaan sarana prasarana tersebut, diharapkan setiap organisasi mampu melakukan tindakan antisipatif terhadap beberapa kesalahan umum tersebut, sehingga organisasi dapat mereduksi, bahkan dapat menghindari kesalahan-kesalahan umum tersebut. Manajemen strategis sarana prasarana Polri Penulis bersama Slog Polri menginventarisir faktor kekuatan (*strength*) manajemen operasional dan organisasi sarpras Polri sebagai berikut:

Komitmen pimpinan dan jajaran Slog Polri untuk melaksanakan manajemen organisasi Slog yang handal;

Keberadaan dan pengelolaan aplikasi internal Polri seperti ILMS, SIMANLOG, dan SIAP untuk mempercepat pengadaan saat kontijensi; Kerja sama dengan berbagai pihak seperti eksekutif (Menkeu dan Bappenas), dan legislatif (Komisi III DPR-RI) dan stake holder untuk pemenuhan sarana prasarana.

Organisasi Biro yang lengkap dan handal
Peluang (*Opportunities*)

Aplikasi Kementrian keuangan aplikasi SIMAK, SIMAN, dan E-RECON

Dukungan lembaga eksternal untuk sinergi pengelolaan sarpras

Adopsi teknologi berbasis digital terutama teknologi tracking dan tracing dalam proses pendistribusian

Dukungan eksekutif dan legislatif dalam manajemen sarpras Polri

Kesimpulan

Keputusan pemerintah untuk membuka keran mudik lebaran disambut antusias masyarakat. Namun hal ini membuka potensi bahaya akan sebaran wabah penyakit Covid-19 termasuk varian baru yaitu varian Delta dan Omicron. Seluruh komponen pemerintah termasuk Polri tentu merasa terpanggil dan bertanggung jawab penuh agar perhelatan akbar mudik lebaran 2022 berlangsung tertib, aman, lancar dan terjaga dari pandemi.

Upaya peningkatan sumber daya Slog Polri dalam pengelolaan sarana prasarana guna manajemen operasional mudik lebaran paripurna Covid-19 didukung Jika melihat dari aspek Sumber Daya organisasi yang telah lengkap dan handal.

Dari aspek sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana Slog polri sudah berjalan menurut mekanisme peraturan yang berlaku.

Dari aspek sistem dan metode, upaya dalam manajemen sarpras dengan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk berbasis teknologi informasi.


Siklus logistik pada kondisi kontijensi paripurna Covid-19 dengan momen mudik lebaran sebenarnya telah cukup lengkap dan terdokumentasi dengan baik untuk analisis dan evaluasi dari semua

POLDA se-Indonesia. Perlunya upaya pemenuhan kompetensi personil Slog Polri dalam manajemen sarana prasarana

guna operasional sehingga pembangunan nasional terdukung.

Permasalahan terbesar dalam siklus logistik paling bermasalah adalah Aspek perencanaan, Pendistribusian, penggunaan, penyimpanan dan perawatan. Upaya dengan sistem manajemen sarana prasarana yang handal sehingga sangat minim kesalahan jenis, salah jumlah, keterlambatan, salah jenis/ tipe dan kurang baik dalam proses pengiriman guna mendukung operasional pengamanan mudik lebaran.

Rekomendasi

- 1) Merekomendasikan kepada Kapolri yang ditujukan kepada Menkeu, Ka BAPPENAS, Ka LKPP, Ka BPKP dan SPR RI kepada agar kiranya dapat bekerjasama, untuk perencanaan dan penganggaran sarana prasarana operasional mudik lebaran.
- 2) Merekomendasikan kepada Kapolri cq. As SDM Polri koordinasi Menteri Keuangan dan Menteri PAN-RB untuk penguatan kebijakan dan sumber daya khususnya pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- 3) Merekomendasikan kepada Kapolri agar kiranya membentuk team Pokja untuk menyusun HTCK, SOP, petunjuk teknis, petunjuk pengarah, petunjuk pelaksanaan dan pedoman siklus logistik peralatan dan sarpras pendukung mudik lebaran. 

Referensi

- Fettke, D. 2008. Transformational Leadership. Lakeland: Small Dogma Publishing.
- Hacker, S. & Roberts, T. (2003). Transformational Leadership: Creating Organizations of Meaning. Mexico: Asq Pr.

- Ismail, Taufik. 2021. Wamenkes Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Mudik Lebaran 2021 Sudah Terlihat, <https://www.tribunnews.com/corona/2021/05/24/wamenkes-sebut-lonjakan-kasus-covid-19-akibat-mudik-lebaran-2021-sudah-terlihat?page=2>.

- Julyaman, Gumilar. 2022. MUDI K LEBARAN 2022, 4 Langkah Antisipasi Polri Siapkan Mudik Aman dan Nyaman Saat Idul Fitri. Desk Jabar. Com. <https://deskjabar.pikiranrakyat.com/nasional/pr-1134337094/mudik-lebaran-2022-4-langkah-antisipasi-polri-siapkan-mudik-aman-dan-nyaman-saat-idul-fitri>
- Muhammad, F. 2003. Menuju Reformasi Polri. Jakarta: Restu Agung.
- Rahardjo, S. 2002. Polisi Sipil dalam Perubahan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Shelton, E. J. 2012. Transformational Leadership: Trust, Motivation and Engagement. Manchester: Trafford.
- Sule, E. Tisnawati & Priansa, D. Juni. 2018. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peraturan dan Perundang-undangan: Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 2. Tanggal 8 Januari 2002. Sekretariat Negara RI. Jakarta.